



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

(Tahun Anggaran 2021)
Audited

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG LAHAT

Jl. Serma jamis No. 65
Pasar Baru, Lahat
Sumatera Selatan



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lahat, 14 Mei 2022
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Masdjaya
NIP 19760123 199803 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Profil Kantor	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Basis Akuntansi	10
A.5. Dasar Pengukuran	10
A.6. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan	17
B.2. Belanja	18
B.3. Belanja Pegawai	19
B.4. Belanja Barang	19
B.5. Belanja Modal	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
C.1. Kas di Bendaharan Pengeluaran	21
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	21
C.3. Kas Lainnya Setara Kas	21
C.4. Belanja di Bayar di Muka	21
C.5. Perediaan	21

C.6. Tanah	22
C.7. Peralatan dan Mesin	22
C.8. Gedung dan Bangunan	22
C.9. Aset Tetap Lainnya	23
C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.11. Aset Lain-Lain	23
C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	23
C.13. Utang kepada Pihak Ketiga	23
C.14. Utang yang Belum Ditagihkan	24
C.15. Uang Muka dari KPPN	24
C.16. Ekuitas	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	25
D.1. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	25
D.2. Beban Pegawai	25
D.3. Beban Persediaan	25
D.4. Beban Barang dan Jasa	26
D.5. Beban Pemeliharaan	26
D.6. Beban Perjalanan Dinas	26
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	27
D.8. Beban Bantuan Sosial	27
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	27
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28
D.11. Beban Kegiatan Non Operasional	28
D.12. Pos Luar Biasa	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1. Ekuitas Awal	29
E.2. Surplus/Defisit LO	29
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	29
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan	29
E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	29

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	29
E.3.5. Koreksi Nilai Lain-lain	29
E.4. Transaksi Antar Entitas	29
E.5. Ekuitas Akhir	30
F. Penjelasan atas Pengungkapan Lainnya	31



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT

Jl. Serma Jamis No. 65, Pasar Baru, Lahat 31411
Telepon (0731) 325298 Faximile (0731) 325366 Email : kpknlahat@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lahat, 14 Mei 2022
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Masdjaya
NIP 19760123 199803 1 001



RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Semester II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1,453,617,881 atau mencapai 82% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp 1,766,509,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 berupa Belanja Barang adalah sebesar Rp1,120,912,570 atau telah mencapai 99% persen dari alokasi anggaran setelah dilakukannya refocusing anggaran sebesar Rp1,136,107,000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1,766,509,000	1,453,617,881	82	3,593,332,860
Belanja Negara	1,136,107,000	1,120,912,570	99	1,812,220,423

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2021. Nilai Aset adalah sebesar Rp2,672,379,079 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 258,208,299 Aset Tetap (neto) sebesar Rp2,629,113,411. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19,227,375 dan Rp2,653,151,704. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan atau (Penurunan) (Rp)
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
Aset			
Aset Lancar	43,265,668	28,191,522	15,074,146
Aset Tetap	2,629,113,411	2,790,516,941	(161,403,530)
Jumlah Aset	2,672,379,079	2,818,708,463	(146,329,384)
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	19,227,375	8,818,800	10,408,575
Jumlah Kewajiban	19,227,375	8,818,800	10,408,575
Ekuitas Dana			
Ekuitas	2,653,151,704	2,809,889,663	(156,737,959)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2,672,379,079	2,818,708,463	(146,329,384)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,453,617,881. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1,275,795,029 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 177,822,852, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp177,822,852 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp177,822,852.

Tabel 3. Ringkasan Laporan Operasional TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	PERIODE		KENAIKAN/PENURUNAN	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,453,617,881	3,590,332,861	(2,136,714,980)	59
JUMLAH PENDAPATAN	1,453,617,881	3,590,332,861	(2,136,714,980)	59
BEBAN				
Beban Operasional	1,275,795,029	1,943,824,150	(668,029,121)	(34)
JUMLAH BEBAN	1,275,795,029	1,943,824,150	(668,029,121)	(34)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	177,822,852	1,646,508,711	(1,468,685,859)	(89)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	655,762	(655,762)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	177,822,852	1,647,164,473	(1,469,341,621)	(89)
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
				0
SURPLUS/DEFISIT LO	177,822,852	1,647,164,473	(1,469,341,621)	(89)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp2,809,889,663 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp177,822,852 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(2,656,500) dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp 331,904,311) dan mengalami penurunan Ekuitas (Rp156,737,959) sehingga di dapatkan bahwa entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 2,653,151,704. Ringkasan perubahan Ekuitas TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Periode LPE	
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	2,809,889,663	2,850,297,323
SURPLUS/DEFISIT LO	177,822,852	1,647,164,473
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH MENGURANGI EKUITAS	(2,656,500)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	(2,656,500)	0
KOREKSI LAIN-LAIN	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(331,904,311)	(1,687,572,133)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(156,737,959)	(40,407,660)
EKUITAS AKHIR	2,653,151,704	2,809,889,663

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	Catatan	2021			2020		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	6	3	4	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH							
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	1,766,509,000	1,453,617,881	82	1,019,920,000	3,593,332,860	352
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		1,766,509,000	1,453,617,881	82	1,019,920,000	3,593,332,860	352
B	BELANJA	B.2						
	BELANJA PEGAWAI	B.3				766,322,000	688,432,623	90
	BELANJA BARANG	B.4	1,136,107,000	1,120,912,570	99	1,171,264,000	1,108,127,800	95
	BELANJA MODAL	B.5				15,696,000	15,660,000	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	B.6				0	0	
	BELANJA SUBSIDI	B.7				0	0	
	BELANJA HIBAH	B.8				0	0	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	B.9				0	0	
	BELANJA LAIN-LAIN	B.10				0	0	
	JUMLAH BELANJA		1,136,107,000	1,120,912,570	99	1,953,282,000	1,812,220,423	99

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	11,922,075	0	11,922,075	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4,500,000	4,500,000	0	0
Persediaan	26,843,593	23,691,522	3,152,071	13.30
JUMLAH ASET LANCAR	43,265,668	28,191,522	15,074,146	53.47
ASET TETAP				
Tanah	1,012,172,000	1,012,172,000	0	0
Peralatan dan Mesin	3,415,089,655	3,415,089,655	0	0
Gedung dan Bangunan	1,542,372,279	1,542,372,279	0	0
Aset Tetap Lainnya	9,945,364	9,945,364	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,350,465,887)	(3,189,062,357)	(161,403,530)	5.06
JUMLAH ASET TETAP	2,629,113,411	2,790,516,941	(161,403,530)	(5.78)
JUMLAH ASET	2,672,379,079	2,818,708,463	(146,329,384)	(5.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,227,375	8,818,800	10,408,575	118.03
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19,227,375	8,818,800	10,408,575	118.03
JUMLAH KEWAJIBAN	19,227,375	8,818,800	10,408,575	118.03
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,653,151,704	2,809,889,663	(156,737,959)	(5.58)
JUMLAH EKUITAS	2,653,151,704	2,809,889,663	(156,737,959)	(5.58)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,672,379,079	2,818,708,463	(146,329,384)	(5.19)

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	PERIODE		KENAIKAN/PENURUNAN	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,453,617,881	3,590,332,861	(2,136,714,980)	59
JUMLAH PENDAPATAN		1,453,617,881	3,590,332,861	(2,136,714,980)	59
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	0	688,432,623	(688,432,623)	(100)
Beban Persediaan	D.3	30,603,009	48,603,110	(18,000,101)	(37)
Beban Barang dan Jasa	D.4	772,925,990	754,208,800	18,717,190	2
Beban Pemeliharaan	D.5	143,984,500	163,784,600	(19,800,100)	(12)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	169,534,500	123,129,400	46,405,100	37
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	158,747,030	165,665,617	(6,918,587)	4
Beban Penyisihan Piutang	D.10	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN		1,275,795,029	1,943,824,150	(668,029,121)	(34)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		177,822,852	1,646,508,711	(1,468,685,859)	(89)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	1,679,999	(1,679,999)	(100)
Pendapatan dari Aset Non Lancar		0	2,999,999	(2,999,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	1,320,000	(1,320,000)	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			(1,024,237)	1,024,237	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	123,965	(123,965)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1,148,202	(1,148,202)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	655,762	(655,762)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.12	177,822,852	1,647,164,473	(1,469,341,621)	(89)
Pendapatan Luar Biasa		0	0	0	0
9 Beban Luar Biasa		0	0	0	0
					0
SURPLUS/DEFISIT LO		177,822,852	1,647,164,473	(1,469,341,621)	(89)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	CATATAN	Periode LPE	
		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	E.1	2,809,889,663	2,850,297,323
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	177,822,852	1,647,164,473
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH MENGURANGI EKUITAS		(2,656,500)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(2,656,500)	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(331,904,311)	(1,687,572,133)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(156,737,959)	(40,407,660)
EKUITAS AKHIR	E.5	2,653,151,704	2,809,889,663

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil Entitas

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lahat

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Wilayah kerja KPKNL Lahat sendiri meliputi 6 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat berkedudukan di Jl. Serma Jamis No. 65, Pasar Baru, Lahat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat mempunyai visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**Aset
Lainnya**

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual Pertama
kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan KPKNL Lahat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021

NO	URAIAN	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,766,509,000	1,453,617,881	82
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,766,509,000	1,453,617,881	82
B	BELANJA			
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0
	BELANJA BARANG	1,136,107,000	1,120,912,570	99
	BELANJA MODAL	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1,136,107,000	1,120,912,570	99

*Realisasi
Pendapatan
Rp1,453,617,881*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,453,617,881 atau mencapai 82% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,766,509,000. Pendapatan KPKNL Lahat terdiri dari Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Pendapatan Jasa Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Lelang PL I Kelas I	1,579,000,000	1,013,625,590	64
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	187,000,000	425,519,976	227
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	509,000	13,972,218	2,745
Jumlah	1,766,509,000	1,453,617,881	82

Realisasi Belanja Negara
Rp1,120,912,570

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,120,912,570 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp1,136,107,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	31 Desember 2021			
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	1,405,871,000	1,136,107,000	1,120,912,570	99
Belanja Modal				
Total Belanja Kotor	1,405,871,000	1,136,107,000	1,120,912,570	99
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah	1,405,871,000	1,136,107,000	1,120,912,570	99

Diakibatkan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan Terjadinya beberapa perubahan pada kebijakan anggaran yang berlaku. Salah satunya berimbas kepada Pengalokasian Dana Belanja Pada Satker Kementerian/Lemabaga Termasuk Juga KPKNL Lahat. Terjadi Refocusing Anggaran Sebesar Rp. 269.764.000. Dibandingkan dengan TA 2020, Anggaran Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp817.175.000 atau sebesar dibandingkan Anggaran belanja pada tahun sebelumnya pada TA 2020. Sedangkan untuk Realisasi Belanja untuk periode 31 Desember 2021 sebesar 1,120,912,570. Untuk melihat perbandingan Realisasi Belanja pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020
Belanja Pegawai	0	688,432,623
Belanja Barang	1,120,912,570	1,108,127,800
Belanja Modal	0	15,660,000
Jumlah	1,120,912,570	1,812,220,423

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2021 adalah Rp0. Hal ini dikarenakan belanja pegawai saat ini sudah dilakukan sentralisasi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang
Rp1,120,912,570

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,120,912,570. Realisasi belanja barang tahun anggaran 2021 sudah mencapai 99% dari anggaran belanja barang TA 2021. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2021

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Operasional	658,161,000	656,903,370	99
Belanja Barang Non Operasional	818,000	343,000	42
Belanja Barang Persediaan	33,000,000	32,954,080	99
Belanja Jasa	126,947,000	117,193,120	92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	172,932,000	169,534,500	99
Belanja Pemeliharaan	144,249,000	143,984,500	99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,136,107,000	1,120,912,570	99

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Diakibatkan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan Terjadinya beberapa perubahan pada kebijakan anggaran yang berlaku. Salah satunya berimbas kepada Pengalokasian Dana Belanja Pada Satker Kementerian/Lemabaga termasuk juga KPKNL Lahat. Terjadi Refocusing Anggaran yang menyebabkan anggaran belanja modal KPKNL Lahat yang mulanya sebesar Rp61,453,000 dilakukan refocusing seluruhnya sehingga KPKNL Lahat tidak mempunyai akun belanja modal pada tahun 2021.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal Hasil UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp11,922,075*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11,922,075. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Belanja Dibayar di
Muka
Rp4,500,000*

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp4,500,000. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya.

*Persediaan Rp
Rp26,843,593*

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26,843,593. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Persediaan

Persediaan	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
Barang konsumsi	23,691,522	3.152.071	26,843,593
Bahan untuk pemeliharaan			0
Bahan baku			0
Jumlah	23,691,522	3.152.071	26,843,593

Tanah

Rp1,012,172,000

C.6 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 adalah Rp1,012,172,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.542 m² dengan nilai sebesar Rp1,012,172,000 dan tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang.

Tabel 11. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,012,172,000
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,012,172,000

Peralatan dan

Mesin

Rp3,415,089,655

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah Rp3,415,089,655. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp3,694,719,741, dan tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada tahun 2021.

Tabel 12. Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3,415,089,655
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3,415,089,655

Gedung dan

Bangunan

Rp1,542,372,279

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah Rp1,542,372,279. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp1,542,372,279 dan tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang selama periode 31 Desember 2021.

Tabel 13. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	1,542,372,279
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,542,372,279

Aset Tetap Lainnya
Rp9,945,364

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Rp9,945,364. Aset tetap tersebut berupa Monografi Rp6,081,514,00, Referensi Rp3,246,750,00, dan buku lainnya Rp617,100,00.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp3,350,465,887).

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3,350,465,887). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Lain-lain
Rp0,00

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya (Rp 0,00)

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 19,227,375

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19,227,375. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja

yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

C. 14 Utang yang Belum Ditagihkan

Pembayaran yang harus dibayar entitas di masa depan yang barang dan jasa telah dikirim. Utang yang Belum Ditagihkan disesuaikan dan diakui di neraca pada akhir setiap periode akuntansi. Penyesuaian digunakan untuk mendokumentasikan barang dan jasa yang telah dikirim namun belum tertagih. Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp 0,00*

C.15 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk digunakan belanja operasional kantor. Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

*Ekuitas
Rp2,653,151,704*

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2,653,151,704. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1,453,617,881

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan dari kegiatan operasional yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,453,617,881.

Tabel 14. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2021

Uraian	Realisasi
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Jasa Lainnya	500,097
Pendapatan Bea Lelang PL I Kelas I	1,013,625,590
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	425,519,976
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	13,972,218
Jumlah	1,453,617,881

Beban Pegawai
Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 0,00. Hal ini dikarenakan karena belanja pegawai saat ini sudah dilakukan sentralisasi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp30,603,009

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30,603,009. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

Tabel 15. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2021
Beban Persediaan	
Beban Persediaan Konsumsi	30,603,009

Beban Barang dan
Jasa
Rp772,925,990

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 772,925,990. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2021
Beban Barang dan Jasa	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,343,200
Beban Jasa Penanganan COVID-19	4,111,000
Beban Barang Operasional Lainnya	33,759,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,920,000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	343,000
Beban Sewa	30,050,000
Beban Langganan Listrik	68,014,410
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	16,113,200
Beban Langganan Air	3,795,000
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
Beban Langganan Telepon	11,165,710
Beban Keperluan Perkantoran	447,311,470
Jumlah	772,925,990

Beban
Pemeliharaan
Rp143,984,500

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 143,984,500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2021
Beban Pemeliharaan	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,241,000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,743,500
Jumlah	143,984,500

Beban Perjalanan
Dinas
Rp169,534,500

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp169,534,500. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi

untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2020
Beban Perjalanan Dinas	
Beban Biasa Perjalanan	161,977,500
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,557,000
Jumlah	169,534,500

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat
Rp0,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0,00

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp158,747,030

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 158,747,030. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perhitungan beban penyusutan dan amortisasi dilakukan Tahunan.

Tabel 19. Rincian Beban Penyusutan dan Amortasi TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2021
Beban Perjalanan Dinas	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35,237,921
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123,509,109
Jumlah	158,747,030

Beban Penyisihan
Piutang tak Tertagih
Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00.

Tabel 20. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2021
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Nilai Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Basa pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp177,822,852.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2,809,889,663

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp2,809,889,663.

Defisit LO
Rp177,822,852

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp177,822,852 . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai dari Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Rp 2,656,500).

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp2,656,500).

Koreksi Nilai Lain-lain Rp0,00

E.3.5 Koreksi Nilai Lain-lain

Koreksi nilai lain-lain tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas (Rp331,904,311)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp331,904,311).

E.5 Ekuitas Akhir

Rp2,653,151,704

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar RP2,653,151,704, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp87,185,202) dibanding tahun 2020.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Tidak ada.

F.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat adalah :

Bendahara Penerimaan:

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI KC Lahat, A/C 0040-01-000-533302 a.n. RPL 144 KPKNL Lahat Untuk Piutang.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI KC Lahat, A/C 00040-01-000-534308 a.n. RPL 144 KPKNL Lahat untuk Lelang.

Bendahara Pengeluaran:

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI KC Jakarta Veteran, A/C 6500-95-061-261000 a.n. BPG 144 KPKNL Lahat.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI KC Lahat, A/C 0040-01-001-216301 a.n. RPL 144 KPKNL Lahat Untuk TS TKPKN.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.4.1 Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan

- Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat KEP Nomor: 37/WKN.04/KNL.03/2021 tanggal 13 Oktober 2021, telah dilakukan penggantian Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat :

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: M. Umar
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dhani Abdul Basieth
Pejabat Penandatangan /	
Penguji SPM	: Rubin Haryadi
Bendahara Pengeluaran	: Amelia Rizkyanti
Petugas Pengelola	
Administrasi Belanja Pegawai	: Angeline Maulidina

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Masdjaya
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dhani Abdul Basieth
Pejabat Penandatangan / Penguji SPM	: Rubin Haryadi
Bendahara Pengeluaran	: Amelia Rizkyanti
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	: Angeline Maulidina